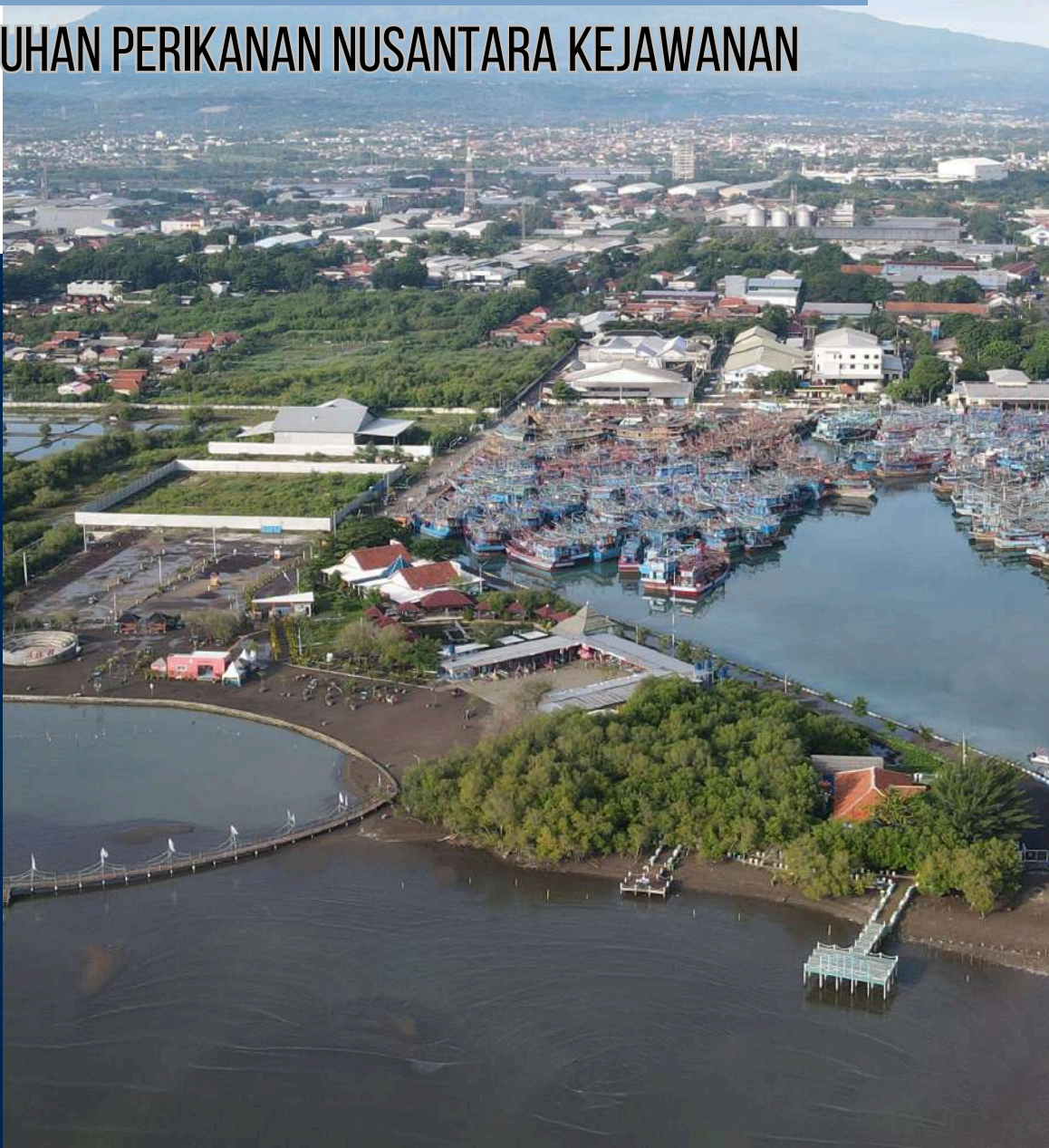


2025

# (REVISI) LAPORAN

## KINERJA TRIWULAN 4

### PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



**Kementerian Kelautan dan  
Perikanan Republik Indonesia**

# LEMBAR PENGESAHAN



## (REVISI) LAPORAN KINERJA (LKj)

### TRIWULAN IV TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon, 11 Februari 2026

*Disetujui oleh:*

Penanggung Jawab,  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Kejawanan



Yusuf Fathanah

*Disusun oleh:*

Ketua Tim,  
Kepala Subbagian Umum

Udin Casrudin

## KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2025 – 2029, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2025, namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di Tahun 2029.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan realisasi atau capaian pada salah satu IKU.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

## **1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. SDM PPN Kejawanan
- 1.6. Sistematika Penyajian

## **2. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap
- 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025
- 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

## **3. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

## **4. PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

## **LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja TA 2025
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja TA 2025
- Rencana Aksi Tahun 2025

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp74.063.778.000,- yang terealisasi sebesar Rp18.016.957.783,- atau 24,33% dari total pagu Tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 113,15%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1).



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh nilai target Tahun 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagai berikut:

1. IK1 - Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)
2. IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)
3. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
4. IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
5. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
6. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
7. IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
8. IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IK9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
10. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
11. IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)

12. IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
15. IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
17. IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sementara untuk 1 (satu) Indikator Kinerja, capaian/realisasi indikator tersebut belum mencapai 100% pada aplikasi kinerjaku, adapun indikator tersebut yaitu:

18. IK16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Namun, IK16 tersebut telah mengalami perubahan atau peningkatan dikarenakan telah dilakukan revisi pengalihan pagu atas sisa pagu DIPA Tahun 2025 dengan mekanisme *carry over*.

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

# BAB I . PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

## 1.2. Gambaran Umum

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Selain itu, Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada Fasilitas Pokok seperti Penahan Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasikan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon diupayakan untuk mewujudkan harapan, menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Udang, Pusat kegiatan perikanan di Pantai Utara bagian Timur Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Kota Cirebon cukup mempunyai potensi untuk mewujudkan harapan tersebut, baik dilihat dari segi potensi perikanan maupun dari segi pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, perhubungan/transportasi, telekomunikasi, listrik, Air PDAM, sumber daya manusia dan lain-lain.



Gambar 2. Master Plan PPN Kejawanan

### 1.3. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;

9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### 1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

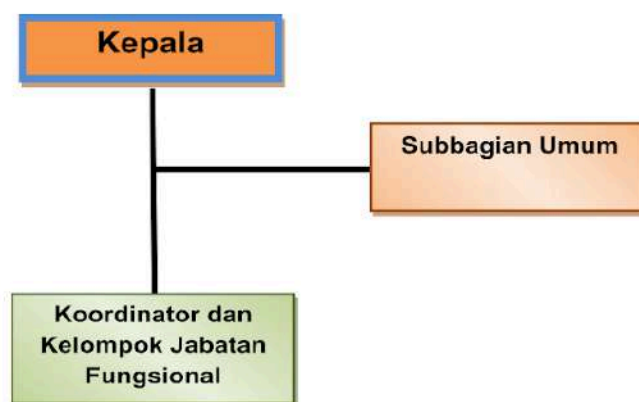
- dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha bertanggungjawab untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti

sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan

fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Pertama), Pranata Keuangan APBN (Mahir), Analis Kepegawaian, Pranata Humas (Terampil), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T).

### PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Gambar 3. Struktur Organisasi PPN Kejawanan

### 1.5. SDM PPN KEJAWANAN

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 48 orang, PPPK sebanyak 26 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan IV Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	-	-	1	1
	- Dukungan Manajerial	-	-	2	-	2
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	5	4	-	9
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya)	-	-	-	1	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	2	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama)	-	-	1	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	8	-	8
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	5	-	5
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	4	-	-	4
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	-	-	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	9	-	9
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	2	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	6	-	-	6
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	1
	- Operator Layanan Operasional	-	4	-	-	4
	- Pengadministrasi Perkantoran	-	4	-	-	4
<b>Jumlah</b>		-	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>76</b>

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan IV Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Pelabuhan	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Kepala Subbagian Umum	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1	-	-	2
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	8	-	-	9
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	2	-	-	3
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	7	-	1	-	-	8
6.	Jabatan Fungsional Tertentu								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	1	4	-	-	-	-	5
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	1	-	3	-	-	4
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	-	-	2	-	-	-	-	2
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)								
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	9	-	-	-	-	9
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	2	-	-	-	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	6	-	-	6
	- Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Operator Layanan Operasional	-	-	-	-	4	-	-	4
	- Pengadministrasi Perkantoran	-	-	-	-	4	-	-	4
	<b>Jumlah</b>	-	3	40	4	29	-	-	76

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Triwulan IV Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	1	1	-
2.	Kepala Subbagian Umum	1	1	-
	- Dukungan Manajerial	2	2	-
3.	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)	1	-	1
	- Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	9	9	-
4.	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya)	1	1	-
	- Tim Kerja Operasional Pelabuhan	3	3	-
5.	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama)	1	1	-
	- Tim Kerja Kesyahbandaran	8	8	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	5	4	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Mahir)	1	1	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	4	4	-
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Muda)	2	1	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Pertama)	1	-	1
	- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Arsiparis (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Muda)	1	-	1
	- Penata Perizinan Ahli (Pertama)	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	9	6	3
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	2	2	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	6	5	1
	- Arsiparis Ahli Pertama	1	1	-
	- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1	-	1
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	-
	- Operator Layanan Operasional	4	4	-
	- Pengadministrasi Perkantoran	4	4	-
<b>Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin</b>		76	60	16
<b>Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin</b>		100,00	78,95	21,05

## 1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Triwulan IV Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Triwulan IV Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan IV Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Kejawatanan Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:



### 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan.

### 2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

### 3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2025.

### 4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab

kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

#### **5. BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

#### **6. LAMPIRAN**

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

# BAB II . PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap

- Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Visi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan dan Mensejahterakan Nelayan”** untuk mewujudkan **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.
- Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.
- Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:
  1. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
  2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
  3. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
  4. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
  5. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

## VISI DAN MISI PPN KEJAWANAN

***“Terwujudnya Pusat Usaha Perikanan Yang Berdaya Saing dan Terintegrasi Bertaraf Internasional”***

Sebagai “Pusat Usaha Perikanan” artinya bahwa wilayah PPN Kejawanan merupakan pusat bagi kegiatan perikanan dari hulu (perikanan tangkap) sampai hilir (pengolahan dan pemasaran ikan).

“Yang Berdaya Saing” artinya produk perikanan di PPN Kejawanan mempunyai mutu yang dapat bersaing pada pasar domestik, dan internasional.

“Dan Terintegrasi” artinya seluruh aktivitas usaha perikanan saling terkait dan mendukung (mewujudkan KKP mini) termasuk aktivitas pendukung non perikanan untuk mengoptimalkan potensi PPN Kejawanan.

“Bertaraf Internasional” artinya seluruh aktivitas dan usaha di PPN Kejawanan memiliki standar Internasional.

## 2.2. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang diturunkan dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	6.548, 82
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	5.500
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	90
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	32
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	575
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	92
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	71,5		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88,5

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk Tahun 2025 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan s.d Triwulan IV Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
<b>1.</b>	<b>2338</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>	<b>59.505.110.000</b>	<b>2.944.602.907</b>	<b>4,94</b>
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	3.152.582.000	2.533.400.625	80,36
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (Unit)	56.350.000.000	411.202.282	0,73
<b>2.</b>	<b>2341</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>	<b>2.528.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>45,09</b>
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	2.528.000	1.140.000	45,09
<b>3.</b>	<b>2342</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>17.220.331.000</b>	<b>15.117.692.534</b>	<b>87,79</b>
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Layanan)	896.055.000	496.853.003	55,45
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	3.051.000	2.940.000	96,36
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	3.198.000	3.196.000	99,94
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	14.251.988.000	13.201.095.186	92,62
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Layanan)	942.300.000	298.651.390	31,69
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal (Layanan)	1.089.000.000	1.082.176.777	99,37
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	2.500.000	2.394.500	95,78
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	11.055.000	10.984.188	99,36
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	12.900.000	11.355.240	88,03
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	8.284.000	8.046.250	97,13

## 2.3. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 6. Perubahan Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV Tahun 2025

**Matriks Capaian Triwulan IV (Perubahan)**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**TAHUN 2025**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TAHUN 2025												Keterangan	
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
								Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
1	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. juta)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Publikasi dan Promosi Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.B)	35.367.000,00	6.548, 82	Rp. juta	1.748,82	2.267,10	129,64%	3.518,82	5.447,45	154,81%	5.118,82	8.380,16	163,71%	6.548,82	10.478,75	160,01%	Tercapai
					Operasional Wisata Bahari Kejawanan (2338.BGA.002.054.D)	217.052.000,00															
					Layanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.E)	75.828.000,00															
					Peningkatan pelayanan pengadaan air bersih (2338.BGA.002.054.J)	408.900.000,00															
					Expo Kelautan dan Perikanan (2338.BGA.002.054.AA)	33.728.000,00															
					Audit Internal Kaji Ulang dan Surveillance Integrasi ISO 14001:2015 dan 9001:2015, dalam rangka mendukung PNPB SDA dan Non SDA (2338.BGA.002.054.W)	27.134.000,00															
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342.EBA.963.051)	3.198.000,00	5.500	Ton	850	1.355,68	159,49%	1.800	1.985,83	110,32%	3.400	4.215,02	123,97%	5.500	5.943,24	108,06%	Tercapai
					Sertifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI) dalam rangka mendukung PNPB Pasca Produksi (2338.BGA.002.054.Y)	9.780.000,00															
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Kepatuhan usahan dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.A)	48.536.000,00	100	Persen										100	100	100,00%	Tercapai
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Implementasi Kebijakan Bidang Kapal Perikanan dalam mendukung PIT (2338.BGA.002.054.Q)	15.610.000,00			87	Nilai	87	96,33	110,72%	87	91	104,59%	87	94,91	109,09%	87	



			Desiminasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.P)	8.870.000,00																			
	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (2338.RBQ.003)	56.225.908.000,00	32	Persen											32	32,95	102,97%	Tercapai		
				Penataan BMN Tanah di PPN Kejawanan atas Bidang Tanah pada HPL 001 dan 002 (2338.BGA.002.054.H)	2.192.000,00																		
	7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan (SELARASKAN) (2338.BGA.002.054.F)	40.130.000,00	30,10	Nilai	30,10	88,60	294,35%	30,10	88,11	292,72%	30,10	92,96	308,84%	30,10	91,99	305,61%	Tercapai			
				Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.K)	76.562.000,00																		
				Gerakan Bersih Pantai PPN Kejawanan dalam rangka mendukung PNBK Pasca Produksi (2338.BGA.002.054.X)	41.400.000,00																		
				Penyelenggaran Kesehatan Lingkungan dalam rangka pelabuhan sehat dalam rangka mendukung PNBK pasca Produksi (2338.BGA.002.054.AD)	11.080.000,00																		
				Gerakan Penghijauan Lingkungan Kawasan Pelabuhan Bersama Stakeholder (2338.BGA.002.054.G)	21.500.000,00																		
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Pemeriksaan kelaikan kapal perikanan	-	575	Kapal	520	556	106,92%	530	625	117,92%	550	701	127,50%	575	767	133,39%	Tercapai		
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dalam rangka mendukung PNBK Pasca Produksi (2338.BGA.002.054.Z)	6.780.000,00	0,26	Nilai											0,26	0,58	223,08%	Tercapai	
					Sosialisasi Penerbitan Buku Pelaut Perikanan dalam rangka mendukung PNBK Pasca Produksi (2338.BGA.002.054.AC)	6.780.000,00																	

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (2342.EBA.960.052.A)	3.051.000,00	75,50	Nilai									75,50	82,05	108,68%	Tercapai				
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan (2342.EBD.955.054.B)	8.078.000,00	85	Persen	85	100	117,65%	85	100	117,65%	85	100	117,65%	85	100	117,65%	Tercapai			
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Layanan Pemantauan dan Evaluasi (2342.EBD.953)	12.900.000,00	88	Nilai										88	88,65	100,74%	Tercapai			
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)		Layanan Manajemen SDM (2342.EBC.954)	2.500.000,00	87	Indeks				82	90,64	110,54%				87	90,77	104,33%	Tercapai			
					Peningkatan Pelayanan Publik (2338.BGA.002.054.AB)	139.926.000,00																		
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PB yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan dan Jasa Tenaga Petugas Pendataan Produksi Iklan (2338.BGA.002.054.C)	596.800.000,00	76	Persen	76	100	131,58%	76	100	131,58%	76	100	131,58%	76	100	131,58%	Tercapai			
					Pengadaan Tenaga Kebersihan (2338.BGA.002.054.DA)	446.100.000,00																		
					Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2342.CAN.955.051)	539.140.000,00																		
					Pengadaan Sarana Internal Pagu Penggunaan PNB (2342.EBB.951.051.E)	302.300.000,00																		
					Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran (2342.EBB.971.051)	1.089.000.000,00																		
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)		Kegiatan Laporan Keuangan dan BMN (2342.EBD.955.054.A)	206.000,00	81	Persen											81	100	123,46%	Tercapai				
			Kegiatan Inventarisasi BMN Terdampak Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.054.HA)	26.136.000,00																				
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)		Layanan Perkantoran (2342.EBA.994)	13.278.936.000,00	92	Nilai				85	92,02	108,26%				92	96,11	104,47%	Tercapai					

17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (2342.EBD.952)	11.055.000,00	71,5	Nilai									71,5	97,00	135,66%	Tercapai	
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Forum konsultasi publik dan Reviu SOP, Standar Pelayanan (2338.BGA.002.054.AE)	10.451.000,00	88,50	Nilai	88,50	94,79	107,11%	88,50	95,33	107,72%	88,50	94,88	107,21%	88,50	93,91	106,11%	Tercapai

Cirebon, 11 Februari 2026  
Mengetahui,



YUSUF FATHANA  
Kepala PPN Kejawanan

# BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s.d Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW IV 2025	REALISASI TW IV 2025	% CAPAIAN
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Juta Rupiah	6.548,82	6.548,82	10.478,75	120
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	5.500	5.500	5.943,24	108,06
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	100	100	100	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	87	87	92,83	106,70
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	90	90	98,04	108,93
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	32	32	32,95	102,97

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW IV 2025	REALISASI TW IV 2025	% CAPAIAN
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	30,10	30,10	91,99	120
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	575	575	767	120
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	Nilai	0,26	0,26	0,58	120
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	75,50	75,50	82,05	108,68
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	85	85	100	117,65
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	88	88	88,65	100,74
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	87	87	90,77	104,33
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	76	76	100	120
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Persen	81	81	100	120

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	TARGET TW IV 2025	REALISASI TW IV 2025	% CAPAIAN
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	92	92	96,11	104,47
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	71,5	71,5	97	120
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	Nilai	88,50	88,50	93,91	106,11

Adapun pembahasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

### 3. 1. 1. Sasaran Kegiatan 1 - Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

#### IKU 1 - Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)

Indikator Penerimaan PNBPN merupakan indikator penerimaan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBPN yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBPN yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA dan non SDA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Kejawanan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh s.d Triwulan IV Tahun 2025. Capaiannya berupa nilai realisasi nilai PNBPN fungsional dan umum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 (kumulatif).

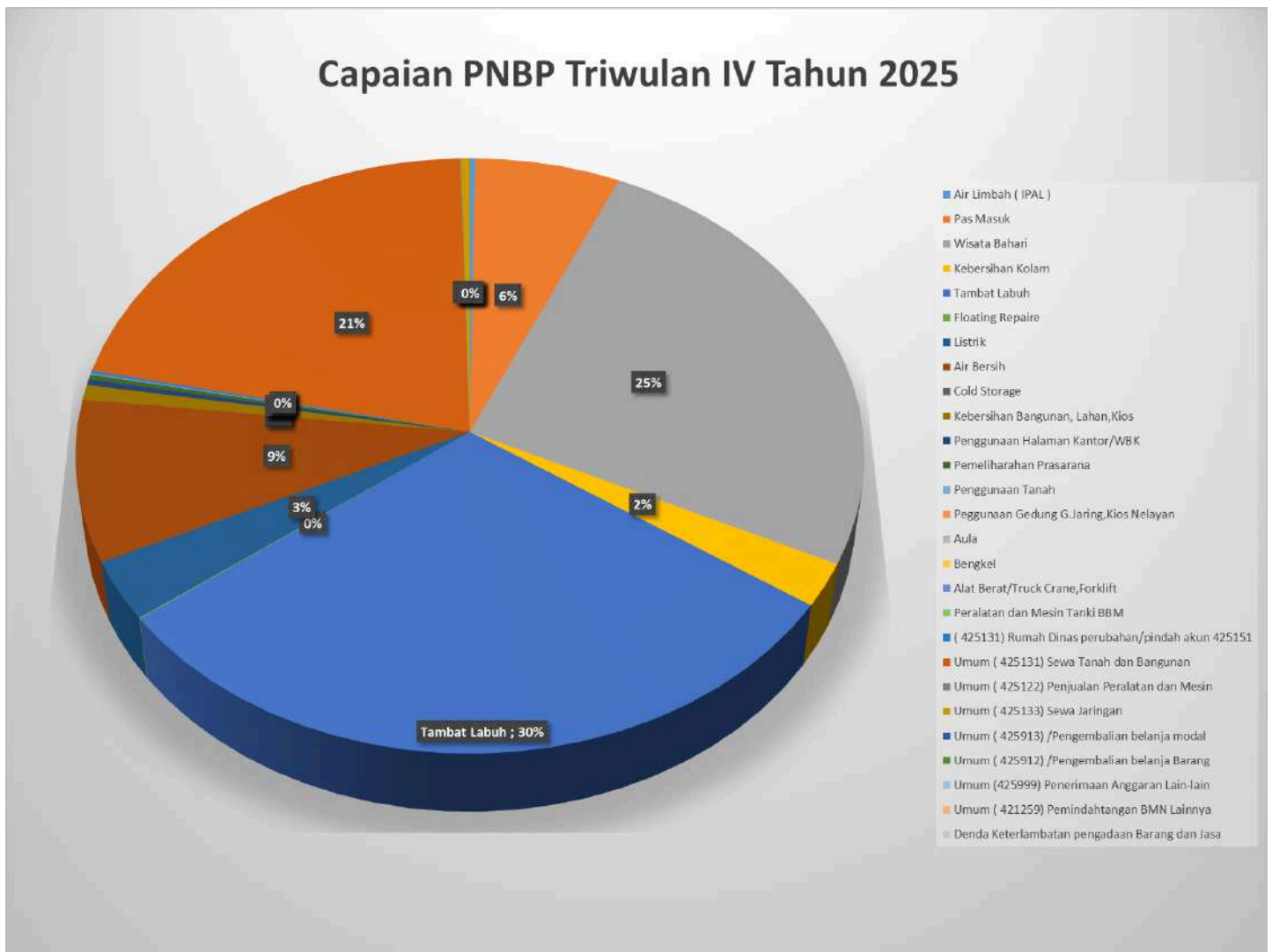
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan										
IK 1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
3.015	4.339,07	4.591,14	8.507,99	11.668,54	6.548,82	6.548,82	10.478,75	160,01	-	-

### a. Target dan Realisasi

Sampai dengan Triwulan IV 2025, Nilai PNBP di PPN Kejawan tercapai sebesar Rp10.478,75 juta atau persentase capaiannya sebesar 160,01% dari target Triwulan IV Tahun 2025.

Capaian tersebut diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Kios Nelayan, Aula, serta penggunaan alat transportasi.



Nilai PNBP tertinggi pada pelayanan tambat labuh sebesar Rp3.170.627.729,- atau sebesar 30% dari total PNBP pada Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel 9. Rincian Nilai PNBP Non SDA di PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

NO.	Bulan	Nilai Penerimaan PNBP Non SDA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Juta Rupiah)
1.	Januari	627.038.681
2.	Februari	707.475.400
3.	Maret	932.580.934
4.	April	1.488.586.873
5.	Mei	767.829.941
6.	Juni	923.941.311
7.	Juli	1.121.657.060
8.	Agustus	1.255.116.162
9.	September	559.938.727
10.	Oktober	634.749.846
11.	November	553.377.299
12.	Desember	910.461.795
Total		10.478.753.836

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 hingga Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 37,52% - 10,30%. Peningkatan PNBP pada triwulan IV Tahun 2025 didukung oleh pelayanan tambat labuh dan meningkatnya pengunjung Wisata Bahari Kejawanan.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)	Target (Rp.Juta)	Realisasi (Rp.Juta)	Persentase (%)
6.548,82	10.478,75	160,01	535,05	1.249,09	233,45

Capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA” bila dibandingkan dengan PPN Pekalongan, capaian di PPN Kejawanan lebih besar dengan realisasi Rp10.478.753.836,-.

#### f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Capaian Nilai PNBP di PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh dari Air Limbah, Pas Masuk, Pas Wisata Bahari, Kebersihan Kolam, Listrik, Pengadaan Air, Kebersihan dan Pemeliharaan Lahan, Penggunaan Tanah dan Kawasan, Tambat Labuh dan Floating Repair, Kios Nelayan, Aula, serta penggunaan transportasi (Alat Berat/Truck Crane, Forklift).

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian PNBP di PPN Kejawanan adalah perubahan cuaca dan tren penangkapan. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pencapaian PNBP khususnya untuk pelayanan tambat labuh, floating repair dan kebersihan kolam.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan” Tahun 2025 yaitu dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki serta meningkatkan fasilitas layanan di PPN Kejawanan.

#### g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan	160,01%	798.009.000	794.439.383	1.276.892.144	482.452.761
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				60,46%	

$= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{98,20\%}{20} \times 50 \right)$	201,14%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp794.439.383,00 atau 99,55% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 60,46% dan nilai efisiensi sebesar 201,14%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IK 1 – Nilai PNBP di PPN Kejawanan, didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang SDM. Dengan pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP ada 13 (tiga belas) pelayanan. Terdapat SDM yang merangkap dalam pelaksanaan pelayanan jasa. Petugas pas masuk harian ada 7 (tujuh) orang, yang bertugas dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Untuk petugas pelayanan jasa air 1 (satu) orang dan listrik 1 (satu) orang, petugas pemanfaatan sewa BMN 2 (dua) orang, petugas pelayanan penggunaan kendaraan 1 (dua) orang, petugas pelayanan jasa tambat labuh 1 (satu) orang, petugas pas harian wisata 9 (sembilan) orang, petugas pelayanan penggunaan halaman wisata bahari 1 (satu) orang, Petugas pengolahan air limbah 1 (satu) orang, Petugas pelayanan penggunaan ruang pertemuan 1 (satu) orang, Petugas penggunaan kawasan 1 (satu) orang.

Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di PPN Kejawanan” yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi kegiatan:

- Publikasi dan Promosi Pelabuhan Perikanan
- Operasional Wisata Bahari Kejawanan
- Layanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan

- Peningkatan pelayanan pengadaan air bersih
- Expo Kelautan dan Perikanan
- Audit Internal Kaji Ulang dan Surveillance Integrasi ISO 14001:2015 dan 9001:2015, dalam rangka mendukung PNPB SDA dan Non SDA

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV terkait dengan pencapaian indikator “Penerimaan PNPB di PPN Kejawanan” yaitu koordinasi terkait perizinan, monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan, serta peningkatan fasilitas untuk menunjang kegiatan di Wisata Bahari Kejawanan.

### 3. 1. 2. Sasaran Kegiatan 2 - Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat

#### IKU 2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)

Indikator Kinerja Utama “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” merupakan hasil perhitungan dari jumlah volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan selama triwulan pada tahun berjalan. Realisasi capaian IKU ini dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d triwulan IV Tahun 2025 adalah sebanyak 5.943,24 Ton atau sebesar 108,06% dari total target Tahun 2025 sebesar 5.500 ton.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat										
IK 2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
4.421,73	6.224,25	4.208,35	5.619,85	6.189,67	5.500	5.500	5.943,24	108,06	6.190.000	0,000096

#### a. Target dan Realisasi

Dari target triwulan IV tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 5.500 ton, jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Kejawanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 tercapai sebesar 5.943,24 ton atau persentase capaiannya 108,06%. Adapun jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap bulannya sebagai berikut :

Tabel 13. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

NO.	Bulan	Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan (Ton)
1.	Januari	455,63
2.	Februari	181,75
3.	Maret	718,30
4.	April	207,69
5.	Mei	72,59
6.	Juni	349,87
7.	Juli	528,28
8.	Agustus	861,25
9.	September	839,66
10.	Oktober	237,28
11.	November	368,86
12.	Desember	1.121,96
Total		5.943,24

#### b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel volume produksi di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut: Realisasi volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan setiap tahunnya mengalami pergerakan yang cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah kapal domisili yang mengalami perubahan fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, trend penangkapan ikan yang berubah-ubah setiap tahunnya, durasi penangkapan ikan yang berubah, perubahan iklim yang semakin tidak menentu, dll. Faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah trip suatu kapal ketika beroperasi melakukan penangkapan ikan di *fishing ground*. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang sama, volume produksi juga mengalami perubahan yang sifatnya fluktuatif.

#### c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Pada triwulan IV Tahun 2025, Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 masih dalam tahap rancangan. Namun dalam rancangan renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap nilai IKU volume produksi sebesar 6,19 juta ton. Jika dibandingkan dengan renstra, volume produksi PPN Kejawanan hanya sebesar 0,000096%. Hal tersebut sangat wajar mengingat target renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan gabungan dari volume produksi seluruh UPT pelabuhan perikanan dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

#### d. Perbandingan dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

#### e. Perbandingan dengan Satker Lain

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Volume produksi perikanan tangkap s.d Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
5.500	5.943,24	108,06	9.000	10.032,72	111,47

Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Pekalongan, capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan jauh lebih kecil dengan selisih 4.089,48 ton. Hal ini dapat dimaklumi mengingat PPN Pekalongan memiliki jumlah kapal domisili yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan PPN Kejawanan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan aktivitas pendaratan ikan serta volume produksi yang besar pula.

#### f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan

Meskipun target volume produksi perikanan tangkap pada Triwulan IV Tahun 2025 tercapai dan bahkan melampaui dari target yang telah ditentukan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kapal domisili yang fluktuatif, trend musim ikan yang semakin tidak terkirakan, trend pelayaran yang semakin panjang, fluktuasi harga BBM, dan faktor alam/cuaca serta faktor faktor tidak terduga lainnya. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik, PPN Kejawanan melakukan beberapa inovasi diantaranya melaksanakan pencatatan produksi secara digital, efisien dan transparan melalui aplikasi bantu pencatatan. PPN Kejawanan juga memaksimalkan pemanfaatan timbangan digital yang turut membantu kinerja petugas di lapangan.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu hambatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak bisa dihindari seperti alam dan cuaca, trend penangkapan yang semakin lama karena semakin sulit mendapatkan ikan, musim ikan yang semakin tidak terprediksi, dll.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki seperti timbangan digital, fasilitas penunjang kegiatan pembongkaran ikan (palet timbangan, selasar portabel, dll) aplikasi bantu pencatatan pendaratan ikan, sumber daya manusia, perawatan sarana dan prasarana, dll.

#### g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja "Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanan" Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 15. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Volume produksi perikanan tangkap	108,06%	12.978.000	12.936.833	14.023.885	1.087.052
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				8,38%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{34,88\%}{20} \times 50 \right)$				70,94%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp12.936.833,00 atau 99,68% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 8,38% dan nilai efisiensi sebesar 70,94%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Kejawanan, didukung oleh 5 (lima) orang petugas pendataan produksi ikan dan 5 (dua) orang validator produksi. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Kejawanan relatif cepat dan kondusif sehingga tidak ada kegiatan pendaratan ikan yang menghabiskan waktu sampai 24 jam/sampai diberlakukan sistem *shift* pegawai.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pelabuhan perikanan yang meliputi kegiatan:

- Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

- Sertifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan (SKPI) dalam rangka mendukung PNBP Pasca Produksi

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Volume Produksi Perikanan Tangkap” yaitu koordinasi dengan instansi terkait perihal validasi data statistik perikanan tangkap.

- Memastikan sarana dan prasarana pendukung seperti timbangan digital, palet, selasar, dll berfungsi secara optimal.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait proses pendataan volume produksi ikan oleh petugas.

### 3. 1. 3. Sasaran Kegiatan 3 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab

**IKU 3 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang dalam prosesnya diperlukan analisa atau evaluasi permohonan perusahaan.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	-	-

#### a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, pada Triwulan IV Tahun 2025 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebesar 100%.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2020 hingga Tahun 2023 belum terdapat indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2024, IKU tersebut memperoleh presentase 100%.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan memperoleh nilai yang sama yaitu 100%.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Keberhasilan realisasi indeks kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, tidak lepas dari komitmen dan kerja keras PPN Kejawanan, khususnya Petugas Pelayanan Pemanfaatan sewa BMN dalam memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Peran serta dari pengguna jasa yang kooperatif dalam menyampaikan kelengkapan berkas permohonan juga menjadi faktor penunjang keberhasilan sehingga proses analisis menjadi lebih cepat.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 18. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanon Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kepatuhan usahan dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan	100%	48.536.000	47.885.661	48.536.000	650.339
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				1,34%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{2,28\%}{20} \times 50 \right)$				53,35%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp47.885.661,00 atau 98,66% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 1,34% dan nilai efisiensi sebesar 53,35%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja 3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi, didukung oleh 2 (dua) orang petugas Petugas Pelayanan Pemanfaatan Sewa BMN yang merangkap jabatan fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Penata Perizinan Pertama, sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Mengacu pada analisis keberhasilan atau kegagalan, beberapa program / kegiatan dapat menjadi solusi yang dapat berdampak peningkatan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Permohonan yang dianalisis dan atau evaluasi yaitu Kepatuhan usahan dan tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan.

#### IKU 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT		
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra	
87,41	88	87,47	90,12	97,42	87	87	92,83	106,70	-	-	

#### a. Target dan Realisasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat kinerja pelabuhan Triwulan IV Tahun 2025 yaitu 92,83 atau 106,70% dari target Tahun 2025.

Tabel 20. Realisasi IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025

NO.	Bulan	Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)
1.	Oktober	94,75
2.	November	93
3.	Desember	90,75
Triwulan IV Tahun 2025		92,83

Tabel 21. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Oktober Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN**  
PPN. Kejawanen

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	October		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	13.00	4.00	Antara 10 - 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	108.48	4.00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100.00	4.00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDMI Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4.00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	970.00	2.00	Antara 750 - 1500 GT
9	Panjang Dermaga	m	848.00	4.00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300.00	4.00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2.00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2.00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19.02	4.00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	117.00	5.00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	6.58	3.75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	16.00	5.00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	272.22	5.00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	7.00	4.00	Diatas 3 kali
19	Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	Jumlah Kegiatan	7.00	4.00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4.00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri perikanan)	%	100.00	4.00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100.00	4.00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100.00	5.00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengaliran Hasil Perikanan di MKOPB	Unit	11.00	3.00	Antara 10 - 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735.30	3.00	Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2979.67	3.00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (71)	2.00	---
Jumlah				94.75	
Kesimpulan dan Rekomendasi			<b>SANGAT BAIK</b>		

Tabel 22. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan November Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN**  
**PPN. Kejawan**

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	November		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	20.00	4.00	Antara 10 - 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	96.66	4.00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	133.22	4.00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan Sarana Pengerjaan Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4.00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	1602.00	3.00	Antara 1500 - 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	848.00	4.00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300.00	4.00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2.00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2.00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19.02	4.00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	290.00	5.00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	12.90	3.75	Antara 5 - 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	35.00	5.00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	46.15	1.25	Ang masuk kurang d
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	13.00	4.00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	Jumlah Kegiatan	11.00	4.00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4.00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri perikanan)	%	100.00	4.00	Suai kebutuhan (100
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100.00	4.00	Suai kebutuhan (100
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100.00	5.00	Suai kebutuhan (100
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di MKOP	Unit	11.00	3.00	Antara 10 - 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735.30	3.00	Optimal (80 - 100
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	3049.29	3.00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (72)	2.00	---
Jumlah				92.00	
Kesimpulan dan Rekomendasi			<b>SANGAT BAIK</b>		

Tabel 23. Rincian Evaluasi Kinerja Tingkat Operasional Bulan Desember Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN**  
PPN. Kejawanan

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Desember		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	27.00	5.00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2.00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Tidak	0.50	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	24.39	1.00	Kurang dari 25%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	100.00	4.00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SPMI Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4.00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	5137.00	4.00	Diatas 2250 GT
9	Panjang Dermaga	m	848.00	4.00	Diatas 150m
10	Kedalaman Kolam	cm	300.00	4.00	Diatas 3m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2.00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2.00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19.02	4.00	Diatas 10 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	550.00	5.00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	36.49	5.00	Lebih dari 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	99.00	5.00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	10.10	1.25	Ang masuk kurang d
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	12.00	4.00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	Jumlah Kegiatan	6.00	4.00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4.00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri perikanan)	%	100.00	4.00	Suai kebutuhan (100)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100.00	4.00	Suai kebutuhan (100)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100.00	5.00	Suai kebutuhan (100)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di MKOPB	Unit	11.00	3.00	Antara 10 - 15 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	735.30	3.00	Kategori Optimal (80 - 100)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	3141.07	3.00	Lebih dari 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (73)	2.00	---
Jumlah				90.75	
Kesimpulan dan Rekomendasi			<b>SANGAT BAIK</b>		

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 cenderung mengalami periode yang fluktuatif. sempat mengalami tren positif di tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya pada periode yang sama meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan, selanjutnya selalu mengalami tren positif. Realisasi terhadap capaian indikator kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kondisi demikian dapat diakibatkan oleh banyak faktor mengingat evaluasi kinerja dipengaruhi oleh 27 kriteria

penilaian, seperti aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal yang setiap tahun mengalami pasang surut, volume produksi harian, dll.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Tidak terdapat IKU tersebut dalam renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
87	92,83	106,70	84	99,25	118,15

Capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan” di PPN Kejawanan tercatat sebesar 92,83 atau 106,7% dari target sebesar 87. jika dibandingkan, capaian tersebut lebih rendah dari PPN Pekalongan yakni sebesar 99,25 atau 118,15% dari target 84 pada periode yang sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah frekuensi kunjungan kapal serta volume produksi yang menjadi penyumbang terbesar dalam perhitungan pemenuhan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pada Tahun 2025, indikator kinerja tingkat operasional pelabuhan telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Penilaian evaluasi kinerja sangat tergantung dari kegiatan operasional yang telah dilaksanakan serta keaktifan operator PIPP dalam memasukkan data operasional, baik secara harian maupun bulanan melalui aplikasi PIPP. Keberhasilan atau kegagalan penilaian evaluasi kinerja terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kriteria yang merupakan kegiatan operasional Pelabuhan di PPN Kejawanan, yaitu :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-Logbook
3. Aplikasi SPB Online
4. SHTI

5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (Docking, Bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan
16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLKK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (Kapal dan Industri Pengolahan)
22. Penyaluran Es (kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan Tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Tercapainya target juga didukung oleh adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok yang melakukan tugasnya, terpeliharanya manfaat fasilitas fungsional dan pokok Pelabuhan perikanan, tersedianya kualifikasi SDM pegawai yang sesuai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan pada Pelabuhan perikanan, dan semakin tumbuh dan berkembangnya stakeholder dalam tata niaga perikanan, serta keaktifan operator PIPP.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain beberapa kriteria bergantung pada aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan, seperti volume produksi, STBLKK, frekuensi kunjungan kapal, dan tambat labuh dimana kriteria kriteria tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti faktor cuaca/alam serta trend dan musim penangkapan ikan, jumlah kapal domisili, dll.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen dan kesadaran masing-masing petugas dalam hal pemenuhan kriteria evaluasi kinerja.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu melakukan penambahan sumber daya manusia agar proses pemenuhan kriteria tidak hanya bergantung pada satu/dua individu, sehingga proses pemenuhan kriteria pada evaluasi kinerja bisa efektif dan efisien.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 25. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Operasional Pelabuhan	106,70%	172.763.000	169.824.629	184.340.107	14.515.478
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				8,40%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{9,59\%}{20} \times 50 \right)$				71,00%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp169.824.629,00 atau 98,30% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 8,40% dan nilai efisiensi sebesar 71%.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Operasional PPN Kejawanan adalah petugas/penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing kelompok serta operator PIPP yang merangkap sebagai pengelola data dan jabatan fungsional AP3T dan P3T.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Operasional Pelabuhan yaitu Monev PIPP dalam rangka mendukung PNBP pasca dan PIT. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pencapaian indikator “Tingkat Operasional Pelabuhan” yaitu sosialisasi serta pembinaan ke pelabuhan binaan meliputi pembinaan kesyahbandaran, pembinaan serta koordinasi terkait pengelolaan dan operasional PIPP, serta mengikuti kegiatan pelatihan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan input PIPP baik diselenggarakan oleh internal maupun Dit. KP.

#### **IKU 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Pelabuhan Perikanan merupakan sarana yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang operasional kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Salah satu fungsi pemerintahannya yaitu menyelenggarakan pelayanan bidang Kesyahbandaran, yang spesifik melayani kapal - kapal perikanan yang beroperasi di pelabuhan perikanan.

PPN Kejawanan, sebagai salah satu pelabuhan perikanan kelas Nusantara, turut melaksanakan tugas dan fungsi Kesyahbandaran sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Pada peraturan tersebut disebutkan setidaknya terdapat 18 tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Namun, pada perhitungan indikator kinerja ini, hanya 3 pelayanan Kesyahbandaran yang dijadikan indikator, yang dianggap sebagai pelayanan yang utama dan paling sering dilaksanakan, antara lain Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar, Pelayanan Penerbitan STBLKK, dan Pelayanan Penerbitan SHTI (Lembar Awal).

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

<b>SK 3</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab</b>										
<b>IK 5</b>	<b>Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>										
<b>Realisasi Tahun 2020 - 2024</b>					<b>Target &amp; Realisasi 2025</b>				<b>Renstra DJPT</b>		
<b>TW IV Tahun 2020</b>	<b>TW IV Tahun 2021</b>	<b>TW IV Tahun 2022</b>	<b>TW IV Tahun 2023</b>	<b>TW IV Tahun 2024</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	<b>Target TW IV Th. 2025</b>	<b>Realisasi TW IV Th. 2025</b>	<b>% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025</b>	<b>Target Renstra 2025</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>	
n/a	n/a	n/a	98,40	98,32	90	90	98,04	108,93	79	124,10	

**a. Target dan Realisasi**

Indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, sehingga pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat realisasi 98,04% dari target tahun 2025. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat pelayanan penerbitan Persetujuan Berlayar (x1) :

**PBT/KPD x 100**

**PBT** = Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (satuan kapal)

**KPD** = Kapal Domisili (kapal yang beraktivitas di PPN Kejawanan)

sehingga didapatkan perhitungan :

$$= 279/286 \times 100$$

$$= 97,55$$

Bobot penerbitan Persetujuan Berlayar = 40%, sehingga;

$$= 97,55 \times 40\%$$

$$= 39,02\%$$

Tingkat pelayanan penerbitan STBLKK (x2):

**STBLKKT/KPD x 100**

**STBLKKT** = STBLKK yang diterbitkan (satuan kapal)

**KPD** = Kapal Domisili (Kapal yang beraktivitas di PPN Kejawanan)

sehingga didapatkan perhitungan :

$$= 279/286 \times 100$$

$$= 97,55$$

Bobot penerbitan STBLKK = 40%, sehingga;

$$= 97,55 \times 40\%$$

$$= 39,02\%$$

Tingkat pelayanan penerbitan SHTI (LT dan LTS) (x3):

**100 - [(VSHTI/SHTI) x 100]**

**VSHTI** = Jumlah permintaan verifikasi SHTI (LT dan LTS)

**SHTIT** = SHTI (LT dan LTS) yang diterbitkan

sehingga didapatkan perhitungan :

$$= 100 - [(0/411) \times 100]$$

$$= 100 - 0$$

$$= 100$$

Bobot penerbitan SHTI (lembar awal) = 20%, sehingga

$$= 100 \times 20\%$$

$$= 20\%$$

Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & x1 + x2 + x3, \text{ sehingga} \\ & = 39,02\% + 39,02\% + 20\% \\ & = \mathbf{98,04\%} \end{aligned}$$

Realisasi capaian triwulan IV tahun 2025 yaitu 98,04%, jumlah ini melebihi target capaian triwulan IV tahun 2025 yaitu 90%. Tercapainya target ini menunjukkan tingginya jumlah tingkat pelayanan kesyahbandaran terhadap kapal (dalam hal ini pelayanan PB, STBLKK dan SHTI) dibandingkan dengan jumlah kapal yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, yaitu 108,93% dari target triwulan IV tahun 2025 yang telah ditentukan.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2019 hingga Tahun 2023 belum terdapat indikator kinerja tersebut. Sementara sejak Tahun 2024, IKU tersebut periode pelaporannya bersifat tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, diketahui bahwa KPD (Kapal Domisili) yaitu kapal yang beraktivitas di PPN Kejawanan, baik pada tahun 2024 maupun 2025 sama yaitu 286 unit. Sementara itu PBT (Persetujuan Berlayar yang diterbitkan) yaitu dengan satuan kapal pada tahun 2024 sejumlah 280 unit kapal sementara pada tahun 2025 berjumlah 279 unit kapal. Perbedaan jumlah ini jelas menjadi penentu persentase capaian yang diraih.

**c. Perbandingan dengan Target Menengah dalam Renstra**

Realisasi tingkat pelayanan kesyahbandaran terhadap kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan apabila dibandingkan dengan target renstra 2025 yaitu 124,10%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
90	98,04	108,93	57	60	105,26

Capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran” untuk PPN Kejawanan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Pekalongan, meskipun keduanya telah melampaui target yang telah ditetapkan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pada Triwulan IV Tahun 2025, IKU terkait Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran sudah dilaksanakan terutama yang terkait langsung dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNPB Pasca Produksi. Realisasi dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025 dan telah melampaui target. Sosialisasi yang intensif dan komprehensif dari petugas kesyahbandaran kepada stakeholder sehingga pemahaman stakeholder terhadap aplikasi ePIT sudah baik merupakan langkah yang telah dilaksanakan PPN Kejawanan sehingga mendukung dalam keberhasilan capaian kinerja pelayanan kesyahbandaran, meskipun terkadang terjadi kendala pada aplikasi TemanSPB dan e-PIT untuk pelayanan kesyahbandaran namun dapat diantisipasi dan diselesaikan oleh petugas.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 28. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelayanan Kesyahbandaran	108,93%	132.581.000	129.785.420	144.424.903	14.639.483
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				11,04%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{16,55\%}{20} \times 50 \right)$				77,60%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp129.785.420,00 atau 97,89% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 11,04% dan nilai efisiensi sebesar 77,60%.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Realisasi capaian indikator ini ditunjang oleh sumber daya manusia Kesyahbandaran yang kompeten dan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima. Sumber daya manusia yang tersedia di PPN Kejawanan guna menunjang capaian indikator kinerja ini antara lain; 6 (enam) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, 5 (lima) orang calon Syahbandar dan 8 (delapan) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan dan laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi.

#### **IKU 6 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

<b>SK 3</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab</b>										
<b>IK 6</b>	<b>Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>										
<b>Realisasi Tahun 2020 - 2024</b>					<b>Target &amp; Realisasi 2025</b>				<b>Renstra DJPT</b>		
<b>TW IV Tahun 2020</b>	<b>TW IV Tahun 2021</b>	<b>TW IV Tahun 2022</b>	<b>TW IV Tahun 2023</b>	<b>TW IV Tahun 2024</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	<b>Target TW IV Th. 2025</b>	<b>Realisasi TW IV Th. 2025</b>	<b>% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025</b>	<b>Target Renstra 2025</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>	
n/a	n/a	n/a	32,05	32,10	32	32	32,95	102,97	6,1	540,16	

**a. Target dan Realisasi**

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa indikator tersebut pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara tahunan, pada Triwulan IV Tahun 2025 capaian yang didapatkan adalah 32.95%.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2020 hingga Tahun 2022 belum terdapat indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2023 nilai yang diperoleh adalah 32,05% dan 2024, IKU tersebut memperoleh nilai 32,10%.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan apabila dibandingkan dengan target renstra 2025 yaitu 540,16%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

<b>PPN Kejawanan</b>			<b>PPN Pekalongan</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
32	32,95	102,97	80	100	125

Capaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan PPN Pekalongan, nilai yang didapat oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pekalongan lebih besar yaitu 125% dari target tahun 2025 sementara Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebesar 102,97%.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan”. Peningkatan fasilitas untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur dilakukan melalui kegiatan pembangunan prasarana Pelabuhan perikanan.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2025 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Langkah yang akan dilakukan antara lain koordinasi terkait perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 31. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	102,97%	56.228.100.000	413.331.782	57.897.371.719	57.484.039.937
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				102,23%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{29,20\%}{20} \times 50 \right)$				305,58%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp413.331.782,00 atau 0,74% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 102,23% dan nilai efisiensi sebesar 305,58%.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan adalah KPA, PPK, Pokja ULP dan Tim Teknis PTP yang semuanya dengan jabatan fungsional, sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah sangat efisien.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja tersebut adalah PPN Kejawanan telah memiliki dokumen pendukung rencana pengembangan Kawasan berupa: Masterplan, AMDAL, AMDAL LALIN, KKRL, KKKPRL dan Dukungan pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon) untuk pengembangan kawasan Pelabuhan perikanan.

#### IKU 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang dioperasikan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan diukur berdasarkan skor pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di *update* berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab										
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	87,87	92,36	30,10	30,10	91,99	305,61	-	-

**a. Target dan Realisasi**

Pengukuran capaian kinerja Indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 91,99 atau 305,61% dari target Triwulan IV Tahun 2025.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami penurunan dari sebesar 0,37 poin. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian pengisian aplikasi SELARASKAN sehingga ada beberapa kendala dalam proses penginputan.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
30,10	91,99	305,61	30,10	82,65	274,58

Capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” dibandingkan dengan UPT Pelabuhan Perikanan Pusat terdekat, yaitu PPN Pekalongan, nilai PPN Kejawanan berada diatas PPN Pekalongan yaitu sebesar 91,99 sedangkan PPN Pekalongan memperoleh nilai sebesar 82,65.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Capaian iku ini dilaksanakan melalui mekanisme penginputan pelaksanaan program dan kegiatan tata kelola lingkungan ke dalam aplikasi SELARASKAN yang merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan di cantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Nilai pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan didukung dengan telah terlaksananya program

pengendalian lingkungan di PPN Kejawanan sehingga memudahkan dalam penginputan dikarenakan sebagian besar program pada aplikasi telah dilaksanakan di PPN Kejawanan.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	305,61%	190.672.000	189.557.572	582.721.504	393.163.932
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				206,20%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{193,51\%}{20} \times 50 \right)$				565,50%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp189.557.572,00 atau 99,42% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 206,20% dan nilai efisiensi sebesar 565,50%.

**2. Sumber Daya Manusia**

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah tim yang terdiri dari Kepala Pelabuhan sebagai penasihat, wakil manajemen lingkungan, pengawasan dan pengendalian, analisa dan pencegahan dampak, rehabilitasi

dan pemulihan dampak, pengendali dokumen dan 6 (enam) orang pelaksana sesuai dengan surat penugasan dari Kepala PPN Kejawanan.

#### **h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/ kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan (SELARASKAN)
2. Pelaksanaan K5 di Pelabuhan Perikanan
3. Gerakan Bersih Pantai PPN Kejawanan dalam rangka mendukung PNBP Pasca Produksi
4. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam rangka pelabuhan sehat dalam rangka mendukung PNBP pasca Produksi
5. Gerakan Penghijauan Lingkungan Kawasan Pelabuhan Bersama Stakeholder

#### **3. 1. 4. Sasaran Kegiatan 4 - Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan**

##### **IKU 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)**

Salah satu tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, utamanya terkait tupoksi kesyahbandaran, PPN Kejawanan bertanggung jawab untuk memastikan setiap kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, terutama pada aspek kelaikan kapal perikanan. Sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama, penerbitan dokumen kapal perikanan, dalam hal ini Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang pegawai yang telah dikukuhkan menjadi Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan dokumen kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri KP No. 33 Tahun 2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan IV Tahun 2025

<b>SK 4</b>	<b>Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan</b>									
<b>IK 8</b>	<b>Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan</b>									
<b>Realisasi Tahun 2020 - 2024</b>					<b>Target &amp; Realisasi 2025</b>				<b>Renstra DJPT</b>	
<b>TW IV Tahun 2020</b>	<b>TW IV Tahun 2021</b>	<b>TW IV Tahun 2022</b>	<b>TW IV Tahun 2023</b>	<b>TW IV Tahun 2024</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	<b>Target TW IV Th. 2025</b>	<b>Realisasi TW IV Th. 2025</b>	<b>% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025</b>	<b>Target Renstra 2025</b>	<b>% thd Target Akhir Renstra</b>
n/a	n/a	613	188	505	575	575	767	133,39	-	-

#### a. Target dan Realisasi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa produktivitas penerbitan dokumen kapal, khususnya SKKP di PPN Kejawanan, sangat tinggi. Hal ini, tak lepas dari komitmen PPN Kejawanan dalam mengakomodasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap pelaku usaha perikanan tangkap. Selain itu, cakupan wilayah kerja yang luas, yakni kapal - kapal perikanan yang berdomisili di wilayah Karawang, Jawa Barat sampai wilayah Tegal, Jawa Tengah, menjadikan PPN Kejawanan sebagai sentra pelayanan penerbitan SKKP. Apabila dilakukan *breakdown* terhadap data akumulatif pada tabel di atas, maka penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 36. Perhitungan Akumulatif Untuk Realisasi IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan IV Tahun 2025

<b>NO.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)</b>
Tahun 2023 - 2024		505
1.	Januari	19
2.	Februari	19
3.	Maret	13
s.d Triwulan I Tahun 2025		556
4.	April	22
5.	Mei	23
6.	Juni	24
s.d Triwulan II Tahun 2025		625
7.	Juli	31
8.	Agustus	18
9.	September	27
s.d Triwulan III Tahun 2025		701
10.	Oktober	33
11.	November	22
12.	Desember	11
s.d Triwulan IV Tahun 2025		767

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Dapat dilihat dari tabel diatas apabila dibandingkan dengan periode yang sama (triwulan IV) pada tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan terkait jumlah sertifikat yang telah diterbitkan yaitu sebanyak 4,3%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kapal yang melakukan migrasi perizinan ke pusat, meskipun kapal berlokasi di pelabuhan - pelabuhan binaan. Sehingga meskipun terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada 30 Desember 2024 tentang penjabaran tata cara dan pedoman Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia jumlah penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan mengalami penurunan.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Tidak terdapat IKU tersebut dalam renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
575	767	133,39	496	584	117,74

Jika dibandingkan jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan izin daerah yang diterbitkan dengan PPN Pekalongan, jumlah sertifikat yang telah diterbitkan di PPN Kejawanan lebih tinggi yaitu 133,39%. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh target PPN Kejawanan yang juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan PPN Pekalongan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya kapal perikanan izin daerah yang berada di PPN Kejawanan dan juga pelabuhan pelabuhan binaan, sementara di PPN Pekalongan dan pelabuhan binaan lebih banyak kapal dengan izin pusat.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Capaian IKU ini dilaksanakan melalui kegiatan mekanisme pembaruan dan reguler (melalui pemeriksaan kelaikan kapal perikanan) berdasarkan permohonan dari pengguna jasa. Pelayanan

penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sepenuhnya dilaksanakan di aplikasi SICEFI melalui tautan [www.kapal.kkp.go.id](http://www.kapal.kkp.go.id). Khusus untuk kapal izin daerah, disposisi penugasan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dilakukan oleh Koordinator, yang dalam hal ini adalah Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, dan proses verifikasi hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta penandatanganan SKKP dilakukan di PPN Kejawanan oleh PPKKP dan Kepala PPN Kejawanan. Sebanyak 66 dokumen SKKP untuk kapal perikanan izin daerah telah diterbitkan selama periode Triwulan IV 2025, jumlah ini mengalami penurunan 4,3% dari SKKP yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 yang berjumlah 69 dokumen.

**Analisa Kuantitatif :**

Capaian IKU ini dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini :

Target (T) = 575 (dokumen) (penjumlahan antara capaian 2023+2024 dengan target Triwulan IV 2025)

Capaian (C) = 767 (dokumen) (penjumlahan antara capaian 2023+2024 dengan capaian Triwulan IV 2025)

$$\begin{aligned} \text{presentase} &= C/T \times 100\% \\ &= 767/575 \times 100\% \\ &= 133,39\% \end{aligned}$$

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 38. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pemeriksaan kelaikan kapal perikanan	133,39%	-	-	-	-
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				-	

$= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{276,25\%}{20} \times 50 \right)$	-

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja tersebut.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, didukung oleh 10 (sepuluh) orang petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal perikanan yang juga merangkap sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, merangkap jabatan fungsional sebagai Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T), juga ada Petugas yang merangkap lagi sebagai Syahbandar Perikanan sehingga pemanfaatan SDM menjadi efisien. Namun, di sisi lain, pemanfaatan SDM ini juga menjadi bahan evaluasi tersendiri karena berpotensi pelaksanaan tugas menjadi tidak fokus yang mungkin dapat menghambat proses pelayanan penerbitan SKKP.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

#### Faktor Penghambat :

Meskipun capaian telah melampaui target IKU, hal - hal yang mempengaruhi antara lain :

1. Pada 2025, banyak kapal izin daerah (di pelabuhan binaan) yang melakukan migrasi perizinan ke izin pusat, sehingga terhitung sebagai penerbitan SKKP untuk kapal izin pusat dan permohonan penerbitan SKKP tersebut tidak melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Hal ini berdampak pada menurunnya jumlah penerbitan SKKP yang telah diterbitkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 4,3% dibandingkan jumlah penerbitan SKKP pada Triwulan IV tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan penerbitan SKKP pada Triwulan III tahun 2025, SKKP yang telah terbit pada Triwulan IV tahun 2025 juga mengalami penurunan sebanyak 15,38%.
2. Kurangnya dukungan anggaran imbas dari efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan sangat berpengaruh terhadap mobilitas dan produktivitas Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) dalam menerbitkan SKKP pada 2025. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah binaan PPN Kejawanan selama ini permohonan SKKP sepanjang Pantai Utara

Jawa dari Kabupaten Brebes sampai dengan wilayah PP. Ciparage di Kabupaten Karawang, sementara Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) yang merangkap sebagai Syahbandar Perikanan terdekat berada di PP. Eretan. Saat ini, telah ada 10 orang Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) namun untuk optimalisasi dan efisiensi maka sebaiknya diajukan calon Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) pada Diklat Kelaikan selanjutnya.

### **Faktor Pendukung :**

Terpenuhinya target IKU didukung oleh beberapa hal di bawah ini :

1. Diberlakukannya kebijakan penerbitan SKKP sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 Tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia yaitu melalui mekanisme Pembaruan (baik Pembaruan yang 1 tahun maupun Pembaruan sementara) sangat membantu dalam penerbitan SKKP di masa kurangnya dukungan anggaran ini. Berdasarkan data penerbitan SKKP sampai dengan Triwulan IV, diketahui bahwa sejumlah 81 dokumen (30,92%) SKKP yang telah terbit melalui mekanisme pembaruan.
2. Permohonan dan penerbitan SKKP melalui aplikasi SICEFI memudahkan Pemohon mengajukan perpanjangan SKKP dimana saja dan kapan saja. Hal ini menjadi faktor yang mendukung dalam penerbitan SKKP melalui mekanisme Pembaruan. Namun, untuk SKKP yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan melalui mekanisme Pembaruan sehingga diwajibkan dilakukan pemeriksaan ke kapal, faktor anggaran masih menjadi kendala.

### **IKU 9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha sub sektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel. Untuk elemen fisik, Kapal Perikanan harus memenuhi persyaratan laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Pemenuhan aspek kelaikan elemen fisik kapal perikanan dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan operasional Kapal Perikanan.

Khusus untuk elemen personel, Kapal Perikanan harus memenuhi aspek kelaikan pengawakan kapal perikanan, baik dari segi kesejahteraan, kompetensi, disiplin, maupun penempatan/susunan jabatan Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan keselamatan pelayaran, perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan, serta keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Pelaksanaan perlindungan kerja bagi Awak Kapal Perikanan merupakan hal penting dan krusial dalam operasional kapal perikanan. Komitmen terhadap penegakan HAM Perikanan menjadi perhatian tersendiri bagi PPN Kejawanan. Melalui penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan aspek perlindungan awak kapal perikanan dapat lebih terjamin. Adapun kompetensi tersebut diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan, keamanan dan keberhasilan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, serta keamanan pangan dan jaminan mutu ikan hasil tangkapan.

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:

- Nilai  $\leq 0,25$  kategori “Kurang”;
- Nilai  $> 0,25$  s.d.  $< 0,50$  kategori “Cukup”;
- Nilai  $> 0,50$  s.d.  $< 0,75$  kategori “Baik”;
- Nilai  $> 0,75$  s.d.  $1,00$  kategori “Sangat Baik”.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 6 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,26	0,26	0,58	223,08	-	-

**a. Target dan Realisasi**

Pengukuran dan pelaporan indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan dilakukan secara semester, pada Triwulan IV Tahun 2025 realisasi capaiannya yaitu 223,08% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2020 hingga Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
0,26	0,58	223,08	0,26	0,44	169,23

Capaian IKU “Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” pada Triwulan IV tahun 2025 di PPN Kejawanan yaitu 223,08% dari target. Apabila ditinjau dari perbandingan dengan target satker terdekat dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama yaitu PPN Pekalongan, target yang telah ditetapkan sama yaitu 0,26. Peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan membutuhkan kolaborasi dan keinginan yang kuat antar pemangku kepentingan. Secara regulasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 telah menetapkan syarat bekerja bagi Awak Kapal Perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi unsur - unsur regulasi tersebut dengan pula memperhatikan aspek - aspek sosial kultural masyarakat nelayan. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan juga melakukan studi banding dengan pelabuhan perikanan di sekitar wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan serta UPT Pelabuhan Perikanan yang setingkat, untuk melihat persentase peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Guna mengetahui nilai persentase perlindungan awak kapal perikanan digunakan rumusan sebagai berikut :

**PENILAIAN TINGKAT PEMENUHAN PERSYARATAN BEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN**

- A. LOKASI  
 Nama UPT : Pelabuhan Perikanan Nusantara Kijawanan  
 Periode : Semester II  
 Tahun : 2025
- B. Kategori Target Nilai Kepatuhan :

Status	Nilai	Batas Bawah	Kategori Pemenuhan Persyaratan	Batas Bawah	Status
Tingkat Kepatuhan 1	≤0,25	0	Kurang	0	Tingkat Kepatuhan 1
Tingkat Kepatuhan 2	>0,25 s.d. ≤0,50	0,26	Cukup	0,26	Tingkat Kepatuhan 2
Tingkat Kepatuhan 3	>0,50 s.d. ≤0,75	0,51	Baik	0,51	Tingkat Kepatuhan 3
Tingkat Kepatuhan 4	>0,75 s.d. 1,00	0,76	Sangat Baik	0,76	Tingkat Kepatuhan 4

C. Capaian Tingkat Kepatuhan

No.	Jenis Kriteria Ukuran	Rata2 Nilai k	Kategori Pemenuhan Persyaratan
1	s.d. 5 GT	0,00	Kurang
2	> 5 s.d. 30 GT	0,75	Baik
3	>30 s.d. 100 GT	0,50	Cukup
4	>100 GT	0,50	Cukup
5	>100 GT Laut Lepas	0,00	Kurang
6	≥300 GT	0,00	Kurang
Nilai Rata-Rata		1,75	
Jumlah jenis kriteria range data		3	0,58

Tingkat Pemenuhan  
 s.d. 5 GT (Kurang)  
 > 5 s.d. 30 GT (Baik)  
 >30 s.d. 100 GT (Cukup)  
 ≥100 GT (Cukup)  
 ≥100 GT Laut Lepas (Kurang)  
 ≥300 GT (Kurang)



Nilai Rata-Rata (nilai rata-rata g/nilai rata-rata f)	<b>0,58</b>	<b>Baik</b>	<b>Tingkat Kepatuhan 3</b>
---	-------------	-------------	----------------------------

Catatan:  
 Pembobotan nilai ini sesuai dengan hasil pengamatan pada pemenuhan persyaratan bekerja di UPT sesuai dengan Krulis/Sijil dan SPB yang diterbitkan

Self declare dari hasil dokumen yang ada, jadi untuk penentuan nya hanya didasarkan pada ceklist dokumen yang masuk tanpa ada pendalaman

Dengan klasifikasi nilai sebagai berikut :

No.	Pemenuhan Persyaratan	Kriteria Range Ukuran Kapal (GT)	Parameter yang diharapkan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Jumlah SPB Terbit di kondisi a	Jumlah SPB Terbit di kondisi b	Jumlah SPB Terbit di kondisi c	Jumlah SPB Terbit di kondisi d	Jumlah Krulis / SPB Terbit (j)	Rata-rata Nilai Pembobotan (i)	Total Nilai (k)	Dota Dukung
				Nilai 0,25 (a)	Nilai 0,50 (b)	Nilai 0,75 (c)	Nilai 1,00 (d)								
1.	Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Bekerja di Atas Kapal Perikanan	s.d 5 GT	Dari SPB yang terbit (Pemenuhan persyaratan (Nakhoda memiliki Sertifikat kompetensi SKN dan Jamsos untuk nakhoda )	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - Jamsos bagi Nakhoda	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - Jamsos bagi Nakhoda - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP	0	0	0	0	0	0	0,00	Krulis
		> 5 s.d. 30 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi) → tanpa BPP dan Sijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	0	0	154	0	154	158	0,75	Krulis dan SPB yang diterbitkan
		>30 s.d. 100 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi, BPP) → tanpa Sijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	0	347	0	0	347	173,5	0,50	Krulis dan SPB yang diterbitkan

No.	Pemenuhan Persyaratan	Kriteria Range Ukuran Kapal (GT)	Parameter yang diharapkan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Jumlah SPB Terbit di kondisi a	Jumlah SPB Terbit di kondisi b	Jumlah SPB Terbit di kondisi c	Jumlah SPB Terbit di kondisi d	Jumlah Krulis / SPB Terbit (I)	Rata-rata Nilai Pembobotan (J)	Total Nilai (K)	Data Dukung
				Nilai 0,25 (a)	Nilai 0,50 (b)	Nilai 0,75 (c)	Nilai 1,00 (d)	(a)	(b)	(c)	(d)				
		2100 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamkos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi, BPP, Sijil)	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Disijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Disijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan - BPP - Disijil	0	10	0	0	10	5	0,50	Siji/Krulis, dan SPB yang diterbitkan
		2100 GT Laut Lega	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamkos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi, BPP, Sijil)	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Disijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Disijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan - BPP - Disijil	0	0	0	0	0	0	0,00	Siji/Krulis, dan SPB yang diterbitkan
		3300 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamkos, Surat Keterangan Sehat (MCU), Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan (endorsement), BPP, Sijil)	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Disijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat (MCU) - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatannya - BPP - Disijil	Terpenuhinya persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamkos - Surat Keterangan Sehat (MCU) - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatannya (endorsement) - BPP - Disijil	0	0	0	0	0	0	0,00	Siji/Krulis, dan SPB yang diterbitkan

Diketahui berdasarkan tabel klasifikasi di atas, bahwa kapal di PPN Kejawanen berada pada klasifikasi ukuran >5 s.d 30 GT, >30 s.d 100 GT dan ≥100GT. Pada klasifikasi ukuran kapal >5 s.d 30 GT, PPN Kejawanen memenuhi persyaratan pada kolom dengan kategori “Baik” dan mendapat nilai 0,75. Pada klasifikasi ukuran kapal >30 s.d 100 GT memenuhi persyaratan pada kategori “Cukup” dan mendapat nilai 0,50. Sementara pada klasifikasi ukuran kapal ≥100GT memenuhi persyaratan pada kategori “Cukup” dan mendapat nilai 0,50. Pemenuhan persyaratan dengan kategori lebih tinggi belum dapat dicapai karena terkendala pemenuhan sertifikat kompetensi yang sesuai jabatan.

## g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 41. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Sosialisasi persyaratan pengawakan kapal	223,08%	13.560.000	13.560.000	30.249.231	16.689.231

perikanan					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$					123,08%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{45,31\%}{20} \times 50 \right)$					357,69%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp13.560.000,00 atau 100% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 123,08% dan nilai efisiensi sebesar 357,69%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menunjang terlaksananya indikator Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan di PPN Kejawan-an antara lain; 6 (enam) orang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 5 (lima) orang calon Syahbandar dan 8 (delapan) orang Petugas Kesyahbandaran yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

#### Faktor penghambat :

1. Lemahnya penegakan peraturan di pelabuhan perikanan, tidak hanya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan-an, namun juga di seluruh Pelabuhan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial kultural ekonomi awak kapal perikanan yang menyebabkan keengganan untuk memiliki sertifikat.
2. Kebutuhan SDM awak kapal yang tinggi menyebabkan *traffic* permintaan awak kapal yang tidak sebanding dengan SDM awak kapal yang telah tersertifikasi. Sementara itu, kapal perikanan tidak bisa menunggu untuk terpenuhinya SDM awak kapal yang tersertifikasi untuk dapat berangkat melaut sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menentukan kebijakan yang bersifat *win win solution*.

3. Pemilik kapal perikanan yang tidak terlalu mementingkan sertifikasi, namun kemampuan bekerja awak kapal yang berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, menyebabkan awak kapal enggan untuk memiliki sertifikat kompetensi.

4. Terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Bekerja Bagi Awak Kapal Perikanan Pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia, yang masih memberikan penangguhan waktu kepada awak kapal perikanan untuk memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikat sesuai jabatan pada kapal perikanan, memiliki Buku Pelaut Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta Surat Keterangan Sehat.

#### **Faktor Pendukung :**

Meskipun banyak dari awak kapal perikanan yang belum memiliki sertifikat kompetensi maupun profisiensi, namun Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tetap berusaha menegakkan aspek perlindungan awak kapal perikanan melalui pengesahan Perjanjian Kerja Laut yang berdasarkan salah satunya dari kepesertaan awak kapal perikanan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Terbukti dari seluruh awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, seluruhnya telah terdaftar asuransi nelayan dan memiliki dokumen PKL. Bahkan sejak bulan Juni 2025, Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah mulai memiliki Buku Pelaut Perikanan dan memiliki Surat Keterangan Sehat. Hal ini dapat terlaksana antara lain dikarenakan faktor - faktor sebagai berikut :

1. Komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, khususnya Syahbandar di PPN Kejawanan yang berwenang dalam hal keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dalam mendukung perlindungan HAM perikanan, salah satunya melalui pemeriksaan dan pengesahan PKL.
2. Kesadaran yang mulai tumbuh dari sisi pelaku usaha dan awak kapal perikanan akan pentingnya perlindungan bagi awak kapal selama bekerja di atas kapal. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang intensif dari PPN Kejawanan kepada masyarakat pemangku kepentingan.

#### **3. 1. 5. Sasaran Kegiatan 5 - Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan**

##### **IKM 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b. Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c. Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d. Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e. Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f. Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
81,34	85,49	85,49	80,94	81,48	75,5	75,5	82,05	108,68	80	102,56

**a. Target dan Realisasi**

Capaian IKM Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 adalah 82,05 atau 108,68% dari target Tahun 2025.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memiliki tren kenaikan positif dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Namun mengalami penurunan di Tahun 2023 dan meningkat kembali di Tahun 2024 dan 2025.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka IKM tersebut memiliki realisasi dengan persentase sebesar 102,56%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
75,5	82,05	108,68	75,5	82,33	109,05

Dengan target yang sama, realisasi Nilai PM ZI PPN Kejawanan lebih rendah dengan selisih nilai 0,28 dari PPN Pekalongan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Keberhasilan dan kegagalan dokumen WBK ditentukan oleh pemenuhan dokumen pendukung WBK yang dihitung dari perbandingan jumlah dokumen WBK yang dipenuhi terhadap dokumen pendukung WBK yang dipersyaratkan.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 44. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona	108,68%	3.051.000	2.940.000	3.315.689	375.689

Integritas					
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				12,31%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{9,54\%}{20} \times 50 \right)$				80,78%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp2.940.000,00 atau 96,36% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 12,31% dan nilai efisiensi sebesar 80,78%.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang melaksanakan tugas terlaksananya capaian indikator kinerja ini masuk dalam Tim WBK berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala Pelabuhan. Jumlah SDM sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang yang terdiri dari Kepala Pelabuhan (Penanggungjawab), Ketua, Sekretaris, serta Koordinator dan Anggota Pokja per masing-masing area. Penggunaan SDM sudah efisien karena semua pegawai yang melaksanakan tugas pemenuhan dokumen WBK melakukan rangkap pekerjaan diluar tupoksi. Selain itu, pengumpulan dokumen ZI WBK dilakukan melalui link *google drive* sehingga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dokumen yang harus dipenuhi.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen Pelaksanaan rencana aksi melalui Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

#### **IKM 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan

IV Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	100	100	85	85	100	117,65	85	117,65

**a. Target dan Realisasi**

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2025 adalah 100% atau 117,65% dari target Tahun 2025, dimana periode Juli - September Tahun 2025 rekomendasi kepada PPN Kejawanan telah tuntas (100%) ditindaklanjuti.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:  
 Pada tahun 2020-2022, tidak terdapat IKM terkait Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM baru pada Tahun 2023. Realisasi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 mencapai 100%.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 117,65%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
85	100	117,65	85	100	117,65

Jika dibandingkan dengan capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di PPN Pekalongan, persentase capaiannya sama dengan PPN Kejawanan sebesar 100%.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi terhadap laporan hasil pengawasan periode Juli - September Tahun 2025 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekomendasi kepada PPN Kejawanan telah tuntas (100%) ditindaklanjuti sehingga IKU persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Kejawanan pada Tahun 2025 sebesar 100%.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 47. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan	117,65%	8.078.000	7.845.250	9.503.529	1.658.279
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				20,53%	

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{39,33\%}{20} \times 50 \right)$	101,32%
---	---------

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp7.845.250,00 atau 97,12% dari total anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 20,53% dan nilai efisiensi sebesar 101,32%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” pada Triwulan III Tahun 2025, didukung oleh tim pengelolaan keuangan.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan untuk tercapainya IKM tersebut adalah kegiatan perjalanan dalam rangka pelaporan.

#### IKM 12 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP.

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
86,36	88,71	80,40	n/a	n/a	88	88	88,65	100,74	88	100,74

**a. Target dan Realisasi**

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 adalah 88,65 atau 100,74% dari target Tahun 2025.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2020 - 2022, IKM terkait Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memiliki capaian yang fluktuatif. Sementara di Tahun 2023 dan 2024, tidak terdapat IKM tersebut.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 100,74%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88	88,65	100,74	88	89	101,14

Capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP” untuk PPN Kejawanan lebih rendah dari PPN Pekalongan dengan selisih nilai 0,35.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Hambatan yang dihadapi adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan secara berkala untuk periode selanjutnya.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 50. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100,74%	12.900.000	11.355.240	12.995.284	1.640.044
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				12,71%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{6,55\%}{20} \times 50 \right)$				81,78%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp11.355.240,00 atau 88,03% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 12,71% dan nilai efisiensi sebesar 81,78%.

**2. Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun 2025, SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota dengan rincian Kepala Subbagian Umum dan perwakilan dari masing-masing tim kerja.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang capaian indikator kinerja “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

### IKM 13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 51. Capaian Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
67,58	80,47	84,86	90,94	91,48	87	87	90,77	104,33	84	108,06

#### a. Target dan Realisasi

Capaian indikator kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2025 sebesar 90,77 atau 104,33% dari target.

#### b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa realisasi Tahun 2021 hingga Tahun 2024 mengalami peningkatan. Namun, pada Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dikarenakan ada beberapa pegawai yang masih belum dimaksimalkan capaian kompetensinya.

#### c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian Tahun 2025 memiliki persentase sebesar 108,06% dari target.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
87	90,77	104,33	87	90,67	104,22

Jika dibandingkan, capaian IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan lebih tinggi dari PPN Pekalongan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, hambatan yang dihadapi yaitu pegawai yang mengikuti bimtek dan sosialisasi belum aktif melaporkan hasil kegiatan bimtek/diklat/sosialisasi yang diikuti ke bagian kepegawaian. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah reminder kepada seluruh pegawai terkait info pendaftaran bimtek/diklat/sosialisasi serta pengumpulan sertifikat bimtek/diklat/sosialisasi dan mengunggah data dukung pada aplikasi MyASN BKN.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 53. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Manajemen SDM	104,33%	142.426.000	140.616.700	148.597.793	7.981.093

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	5,60%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{14,18\%}{20} \times 50 \right)$	64,01%

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp140.616.700,00 atau 98,73% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 5,60% dan nilai efisiensi sebesar 64,01%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 76 (tujuh puluh enam) orang ASN. Agar capaian IP ASN maksimal, masing – masing pegawai telah diarahkan mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan jenis jabatan memenuhi kriteria penilaian dimensi kompetensi selain itu diadakan beberapa kali kegiatan pembinaan pegawai dan monitoring bulanan SKP pegawai untuk menjaga nilai kinerja serta tingkat kedisiplinan pegawai.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” pada Tahun 2025 yaitu monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan disiplin pegawai. Selain itu, pegawai dihimbau untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Seminar/Workshop secara luring maupun daring.

#### **IKM 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan

kualitas perencanaan PBJ unit kerja. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	76	76	100	131,58	76	131,58

**a. Target dan Realisasi**

Capaian IKM Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 adalah 100% atau 131,58% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2020 hingga Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 131,58%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
76	100	131,58	76	100	131,58

Capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP” untuk PPN Kejawanan dan PPN Pekalongan memiliki capaian yang sama sebesar 100%.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan. Selain itu, jika dimungkinkan melakukan upaya percepatan pengadaan jasa melalui penyedia serta dilakukan pemantauan dan percepatan PBJ.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 56. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	131,58%	2.973.340.000	2.880.621.376	3.912.289.474	1.031.668.098
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				34,70%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$				136,74%	

$= 50\% + \left( \frac{16,18\%}{20} \times 50 \right)$	
--	--

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp2.880.621.376,00 atau 96,88% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 34,70% dan nilai efisiensi sebesar 136,74%.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola PBJ.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing.

#### **IKM 15 - Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)**

Indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Tabel 57. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	85	85	87,5	90	81	81	100	123,46	81	123,46

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 sebesar 100 atau 123,46% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2020 belum terdapat indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sementara di Tahun 2021-2025, capaian IKM tersebut mengalami peningkatan.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2025 memiliki persentase sebesar 123,46%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
81	100	123,46	81	100	123,46

PPN Kejawanan mempunyai target dan realisasi yang sama dengan PPN Pekalongan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat tanah hibah dari perorangan yang belum peralihan hak pengelolaan tanah, namun akan berkoordinasi dengan KPKNL Kota Cirebon dan dimasukkan ke dalam program sertifikasi tanah oleh KPKNL.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 59. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Pengelolaan BMN	123,46%	26.342.000	25.213.061	32.520.988	7.307.927
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				27,74%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{13,05\%}{20} \times 50 \right)$				119,36%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp25.213.061,00 atau 95,71% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 27,74% dan nilai efisiensi sebesar 119,36%.

**2. Sumber Daya Manusia**

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 1 (satu) orang Pengelola BMN.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yaitu pelaksanaan kegiatan laporan keuangan dan BMN yang merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

**IKU 16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Tabel 60. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
95,79	95,67	94,41	95,69	96,17	92	92	96,11	104,47	92	104,47

**a. Target dan Realisasi**

Capaian indikator kinerja Nilai IKPA sebelumnya sebesar 84,51 atau 91,86% dari target, namun mengalami peningkatan menjadi 96,11 atau 104,47% dari target setelah dilakukan revisi pengalihan pagu atas sisa pagu DIPA Tahun 2025 dengan mekanisme carry over ke dalam DIPA Tahun 2026 Revisi ke-3 tanggal 10 Februari 2026.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, capaian nilai IKPA bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh realisasi penyerapan anggaran.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian 2025 memiliki persentase sebesar 104,47%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV Tahun 2025 di PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
92	96,11	104,47	92	98,49	107,05

Jika dibandingkan PPN Kejawanan dengan PPN Pekalongan, capaian Indikator Kinerja “Nilai IKPA” PPN Kejawanan lebih rendah.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Pengukuran dan pelaporan indikator kinerja ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi 13 (tiga belas) komponen yang terdapat pada monev PA pada aplikasi OM-SPAN. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini berhubungan dengan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi Penyampaian SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Pengembalian/Kesalahan SPM, dan Perencanaan Kas.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

Setelah dilakukan revisi pengalihan pagu atas sisa pagu DIPA Tahun 2025 ke DIPA Tahun 2026 dengan mekanisme *carry over*, realisasi Nilai IKPA meningkat menjadi 96,11. Hal tersebut dikarenakan

nilai penyerapan anggaran meningkat menjadi 99,77 yang sebelumnya bernilai 41,75. Realisasi penyerapan anggaran meningkat dikarenakan pagu sumber dana PHLN yang tidak terserap di Tahun 2025 telah dialihkan ke DIPA Tahun 2026.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 62. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perkantoran	104,47%	13.278.936.000	13.155.612.028	13.872.158.032	716.546.004
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				5,40%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{2,76\%}{20} \times 50 \right)$				63,49%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp13.155.612.028,00 atau 99,07% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 5,40% dan nilai efisiensi sebesar 63,49%.

**2. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen, didukung 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengelola Monev, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Mahir, serta 2 (dua) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

**IKU 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKPA didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Tabel 63. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	n/a	90	71,5	71,5	97	135,66	81,5	119,02

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 sebesar 97 atau 135,66% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Tahun 2020 hingga triwulan III Tahun 2024 belum terdapat indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. IKM tersebut baru muncul pada triwulan IV Tahun 2024 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2025

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Persentase perbandingan dengan target dalam Renstra adalah 119,02%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
71,5	97	135,66	71,5	94,25	131,82

PPN Kejawanan mempunyai realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPN Pekalongan.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi.

Faktor penghambat pencapaian NKPA yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 65. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	135,66%	11.055.000	10.984.188	14.997.692	4.013.504
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				36,30%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{5,26\%}{20} \times 50 \right)$				140,76%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp10.984.188,00 atau 99,36% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 36,30% dan nilai efisiensi sebesar 140,76%.

**2. Sumber Daya Manusia**

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

**h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Komponen kegiatan dalam RKAK/L yakni pelaksanaan kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKM tersebut.

**IKU 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 66. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan										
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target & Realisasi 2025				Renstra DJPT	
TW IV Tahun 2020	TW IV Tahun 2021	TW IV Tahun 2022	TW IV Tahun 2023	TW IV Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW IV Th. 2025	Realisasi TW IV Th. 2025	% Realisasi thd Target TW IV Th. 2025	Target Renstra 2025	% thd Target Akhir Renstra
n/a	n/a	n/a	90,43	96,26	88,5	88,5	93,91	106,11	88,5	106,11

**a. Target dan Realisasi**

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 93,91 atau 106,11% dari target.

**b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada Periode yang Sama**

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Pada tahun 2020-2022, tidak terdapat IKM terkait Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM dimaksud merupakan IKM

baru pada Triwulan IV Tahun 2023. Realisasi IKM tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024.

**c. Perbandingan dengan Target dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka persentase realisasi IKM tersebut mencapai 106,11%.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

**e. Perbandingan dengan Satker Lain**

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama.

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dengan PPN Pekalongan

PPN Kejawanan			PPN Pekalongan		
Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
88,5	93,91	106,11	88,5	92,17	104,15

Jika dibandingkan dengan PPN Pekalongan, realisasi capaian Nilai SKM PPN Kejawanan lebih tinggi dengan selisih nilai sebesar 1,74.

**f. Analisa Keberhasilan atau Kegagalan**

Aplikasi sudah dibuat semudah mungkin, namun pengguna jasa belum secara utuh mengerti informasi standar produk pelayanan, sehingga perlunya penyajian informasi standar produk pelayanan dan penyampaian penjelasan produk layanan kepada pengguna.

**g. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**1. Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 68. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (2)	(6) = (5) - (4)

Forum konsultasi publik dan Reviu SOP, Standar Pelayanan	106,11%	10.451.000	10.448.660	11.089.869	641.209
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				6,14%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left( \frac{4,88\%}{20} \times 50 \right)$				65,34%	

Realisasi penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp10.448.660,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran Tahun 2025 dengan efisiensi 6,14% dan nilai efisiensi sebesar 65,34%.

## 2. Sumber Daya Manusia

SDM yang mendukung terlaksananya capaian indikator kinerja ini sebanyak 1 (satu) orang Pranata Komputer.

### h. Analisa Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Komponen kegiatan yang dapat mendukung IKM tersebut yakni Forum Konsultasi Publik.

## 3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp74.063.778.000,00 yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 69. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	59.502.582.000

2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2.528.000
2342	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.220.331.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp74.063.778.000,-</b>

Dari pagu anggaran tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah menargetkan sebesar Rp74.063.778.000,- dengan realisasi capaian anggaran sebesar Rp18.016.957.783,- atau 24,33% dari jumlah pagu Tahun 2025.

Tabel 70. Realisasi Keuangan PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2338	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>	<b>59.505.110.000</b>	<b>2.944.602.907</b>	<b>4,94</b>
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar (Lembaga)	3.152.582.000	2.533.400.625	80,36
	RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I (Unit)	56.350.000.000	411.202.282	0,73
2.	2341	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>	<b>2.528.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>45,09</b>
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	2.528.000	1.140.000	45,09
3.	2342	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>17.220.331.000</b>	<b>15.117.692.534</b>	<b>87,79</b>
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Layanan)	896.055.000	496.853.003	55,45
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	3.051.000	2.940.000	96,36
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi (Layanan)	3.198.000	3.196.000	99,94
	EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan)	14.251.988.000	13.201.095.186	92,62
	EBB.951	Layanan Sarana Internal (Layanan)	942.300.000	298.651.390	31,69
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal (Layanan)	1.089.000.000	1.082.176.777	99,37
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM (Layanan)	2.500.000	2.394.500	95,78
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	11.055.000	10.984.188	99,36
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	12.900.000	11.355.240	88,03
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	8.284.000	8.046.250	97,13

# BAB IV. PENUTUP

## 4. 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp74.063.778.000,- yang terealisasi sebesar Rp18.016.957.783,- atau 24,33% dari total pagu Tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 113,15%. (Sesuai dashboard pada Aplikasi KinerjaJaku pada Gambar 4).



Gambar 4. Dashboard pada aplikasi KinerjaJaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Triwulan IV Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh nilai target Tahun 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagai berikut:

1. IK1 - Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Rp. Juta)
2. IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Ton)
3. IK3 – Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
4. IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
5. IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
6. IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Persen)
7. IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)
8. IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IK9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
10. IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)

11. IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
12. IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
13. IK13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)
14. IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
15. IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)
16. IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)
17. IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Sementara untuk 1 (satu) Indikator Kinerja, capaian/realisasi indikator tersebut belum mencapai 100% pada aplikasi kinerjaku, adapun indikator tersebut yaitu:

18. IK16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)

Namun, IK16 tersebut telah mengalami perubahan atau peningkatan dikarenakan telah dilakukan revisi pengalihan pagu atas sisa pagu DIPA Tahun 2025 dengan mekanisme *carry over*.

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

## 4. 2. Saran

Dengan tercapainya semua target IKU dan IKM pada Triwulan IV Tahun 2025 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di triwulan berikutnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Kejawanan secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 masih belum sempurna. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan pada bulan Februari 2026 yaitu revisi pengalihan pagu atas sisa pagu DIPA Tahun 2025 dengan mekanisme *carry over* ke dalam DIPA Tahun 2026.

Semoga Laporan Kinerja PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2025 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Kejawanan di triwulan selanjutnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yusuf Fathanah**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

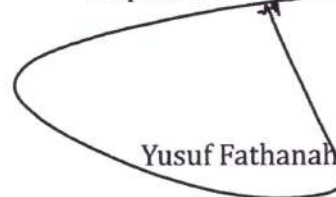
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA  
Kepala PPN Kejawanan

  
Yusuf Fathanah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	6.548,82
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	5.500
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang optimal dan bertanggung jawab	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	87
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	90
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	32
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	575
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	75,5
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88
		13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	87
		14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	76
		15. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	81
		16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	92
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	71,5
		18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai)	88,5

**Data Anggaran :**

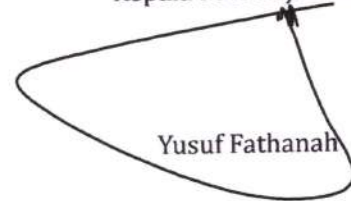
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	59.502.582.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2.528.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.220.331.000
<b>Total Anggaran PPN Kejawanan Tahun 2025</b>		<b>76.725.441.000</b>

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA  
Kepala PPN Kejawanan

  
Yusuf Fathanah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON 45113  
TELEPON (0231) 210084, FAKSIMILE (0231) 231383  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ppn.kejawanan@kkp.go.id](mailto:ppn.kejawanan@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN  
Nomor : B.10/KPA-PPNK/KP.110/I/2026**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2026 pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran Nomor KEP.16/PA/2025 tentang Perubahan Ketujuh Puluh Dua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Anggaran Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-032.03.2.622482/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Tim Penyusun Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) PPN Kejawanan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini melaksanakan tugas dan

bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN  
NUSANTARA KEJAWANAN



f YUSUF FATHANAH, S.Pi, M.Si  
NIP. 19781125 200312 1 003

LAMPIRAN

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
 Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan  
 Nusantara Kejawanan Nomor:  
 B.10/KPA-PPNK/KP.110/I/2026 Tentang  
 Penunjukan Tim Penyusunan Laporan  
 Kinerja Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan  
 Nusantara Kejawanan Tahun Anggaran 2026

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Udin Casrudin, S.E., M.M	Ketua
2.	Sari Puspita, S.Psi	Sekretaris
3.	Ana Sholihah Nugraheni, A.Md	Anggota
4.	Mutia Rahayu, S.Pi	Anggota
5.	Zulfan Fahmi Geva Aqviansyah, A.Md	Anggota
6.	Shandra Dewi Adresanty, S.S.T.Pi	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2026

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kepala Subbagian Umum	f
2.	Katimja OP	A
3.	Katimja Kesyahbandaran	Q
4.	Katimja TKPU	Q

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 SATUAN KERJA PELABUHAN  
 PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



YUSUF FATHANAH, S.Pi, M.Si  
 NIP. 19781125 200312 1 003









